



TESIS

Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Berdasarkan
Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Disusun oleh :
MUHAMMAD JODI WIRANTO
NIM. 207221008

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Berdasarkan
Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun oleh :
MUHAMMAD JODI WIRANTO
NIM. 207221008

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

Pengesahan

Nama : MUHAMMAD JODI WIRANTO
NIM : 207221008
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul Tesis : Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Berdasarkan
Ketentuan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Title : Legal Policy for Filling the Position of Governor Based on
the Provisions of Article 18 Paragraph 4 of the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER
HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. AMAD SUDIRO, S.H., M.Hum, M.M., Dr., MKn., Prof
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

AMAD SUDIRO, S.H., M.Hum, M.M., Dr.,
MKn., Prof
NIK/NIP: 10292010



Jakarta, 15-Januari-2025

Ketua Program Studi



AMAD SUDIRO, S.H., M.Hum, M.M., Dr., MKn., Prof

Persetujuan

Nama : MUHAMMAD JODI WIRANTO
NIM : 207221008
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Berdasarkan
Ketentuan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 18-Desember-2024

Pembimbing:
AMAD SUDIRO, S.H., M.Hum, M.M., Dr.,
MKn., Prof
NIK/NIP: 10292010



ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh rakyat merupakan perwujudan daripada hak konstitusional warga negara dalam hal berbangsa dan bernegara, dan perwujudan kewajiban konstitusional dalam hal kewajiban mematuhi dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam konstitusi. Tujuan penelitian ini mengetahui dan menganalisis politik hukum pengisian jabatan Gubernur berdasarkan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengetahui dan mengkaji sistem pengisian jabatan Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (statue approach). Berdasarkan hasil penelitian bahwa rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 bersifat open texture dan opened legal policy, kepala daerah merupakan chief of local government, wajib ada kepala daerah dan jumlahnya 1, wakil kepala daerah tidak wajib ada, kepala daerah wajib dipilih secara demokratis, calon kepala daerah tidak harus diajukan oleh partai politik, kepala daerah terpilih cukup memperoleh simple majority suara dan wakil kepala daerah tidak wajib dipilih secara demokratis. Sistem pengaturan pengisian jabatan gubernur sebagai kepala pemerintahan ke depan sesuai dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan secara langsung yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, dengan memberi ruang kepada daerah untuk melakukan pemilihan tidak langsung/ perwakilan oleh DPRD.

Kata kunci: Politik Hukum, Pengisian Jabatan, Gubernur, UUD

ABSTRACT

The election of regional heads carried out by the people is a manifestation of the constitutional rights of citizens in terms of nation and state, and the manifestation of constitutional obligations in terms of the obligation to comply with and carry out national and state life based on a mutual agreement stated in the constitution. The purpose of this study is to find out and analyze the legal policy of filling the position of Governor based on Article 18 Paragraph 4 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and to find out and study the system of filling the position of Governor as Head of the Provincial Government in laws and regulations. This research method uses a normative legal research type. In this study, the approach used is legislation (statue approach). Based on the results of the study, the formulation of Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is open texture and opened legal policy, the regional head is the chief of local government, there must be a regional head and the number is 1, a deputy regional head is not required, the regional head must be elected democratically, regional head candidates do not have to be proposed by political parties, the elected regional head is sufficient to obtain a simple majority of votes and the deputy regional head is not required to be elected democratically. The system for regulating the filling of the position of governor as head of government in the future in accordance with Article 18 Paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is direct elections which are a manifestation of the sovereignty of the people, by providing space for regions to carry out indirect/representative elections by the DPRD.

Keywords: Legal Politics, Filling of Positions, Governor, UUD

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul **“Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Berdasarkan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari tesis, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini akan sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama penulis menjalani Pendidikan maupun dalam penyelesaian tesis ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Rektor Universitas Tarumanagara, Dekan Fakultas Hukum dan Dosen Pembimbing dalam Pembuatan Tesis ini.
2. Ibu Dr. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Christine ST. Kansil, S.H., M.Hum, selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis dan Ketua Sidang Tesis yang telah membimbing dan memberikan ilmu serta masukan pada saat penyusunan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Gunawan. Djajaputra, S.H., S.S., M.H., selaku Dosen II Penguji Seminar Proposal Tesis yang telah membimbing dan memberikan ilmu serta masukan pada saat penyusunan Tesis ini.
6. Kepada Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku Dosen III Penguji Sidang Tesis yang telah memberikan masukan ilmu dalam Tesis ini.

7. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
8. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah membantu menyelesaikann Tesis saya dan memeberikan dukungan selama ini, sehingga Tesis ini bisa selesai.
9. Kepada Keluarga Tercinta, Orang Tua, dan Saudara-Saudara yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti.
10. Teman-Teman Seperjuangan, yang senantiasa memberikan semangat, ide, dan dukungan positif.
11. Kepada Bapak Zulfikar Arse Sadikin, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, yang telah membantu dan memberika support dan dukungan selama pembuatan tesis ini berlangsung.

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, Januari 2025

Penulis

Muhammad Jodi Wiranto

Pernyataan

Nama : MUHAMMAD JODI WIRANTO
NIM : 207221008
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Berdasarkan
Ketentuan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18-Desember-2024
Yang menyatakan



MUHAMMAD JODI WIRANTO
NIM. 207221008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
D. Kerangka Konsep	19
E. Metode Penelitian	31
F. Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Teori Politik Hukum	34
B. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	38
C. Teori Otonomi Daerah.....	45
D. Kedudukan Kepala Daerah.....	49
E. Prosedur Pengisian Jabatan Kepala Daerah.....	51
F. Teori Penafsiran.....	63
1. Penafsiran Gramatikal	63
2. Interpretasi Historis	64
3. Interpretasi Sistematis.....	65
4. Interpretasi Teleologis/Sosiologis	65
5. Interpretasi Komparatif.....	66
6. Interpretasi Restriktif.....	66

7. Interpretasi Ekstensif	67
8. Interpretasi Autentik	67
9. Interpretasi Interdisipliner	67
10. Interpretasi Multidisipliner	68
G. Teori Sinkronisasi	68
H. Teori Negara Hukum	73
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	82
A. Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Berdasarkan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	82
B. Sistem Pengisian Jabatan Gubernur Sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi dalam Peraturan Perundang- Undangan	98
1. Pengaturan Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah.....	99
2. Pengaturan Pengisian Jabatan Gubernur Sebagai Kepala Pemerintahan Ke Depan Sesuai Dengan Pasal 18 Ayat (4) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	106
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	111
A. Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Berdasarkan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	111
B. Sistem Pengisian Jabatan Gubernur Sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi dalam Peraturan Perundang- Undangan	124
BAB V PENUTUP	150
A. Kesimpulan	150
B. Saran	150
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN	155

DAFTAR SINGKATAN

UUD	adalah Undang-Undang Dasar
UUD NRI	adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UU	adalah Undang-Undang
MK	adalah Mahkamah Konstitusi
MA	adalah Mahkamah Agung
DPR	adalah Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	adalah Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
APBN	adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PTUN	adalah Pengadilan Tata Usaha Negara
TUN	adalah Tata Usaha Negara
RUU	adalah Rancangan Undang-Undang

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....	155
Lampiran 2	Keputusan Dekan Pembimbing Tesis	156
Lampiran 3	Rekap Bimbingan Tesis.....	159
Lampiran 4	Surat Keterangan Turnitin Tesis	160
Lampiran 5	Hasil Turnitin Tesis	161
Lampiran 6	Hasil Turnitin Proposal Tesis	163
Lampiran 7	LOA/Surat Keterangan Publikasi Jurnal	166
Lampiran 8	Bukti Publikasi Jurnal (Jurnal Halaman 1).....	167